



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUKHIBATUL KHUSNAH
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 864195

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **8.995.950.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 185 m2/185 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/180 m2 di KAB / KOTA GRESIK, WARISAN Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/120 m2 di KAB / KOTA GRESIK, WARISAN Rp. 757.000.000
4. Tanah Seluas 19520 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 1.149.600.000
5. Tanah Seluas 49500 m2 di KAB / KOTA GRESIK, WARISAN Rp. 2.869.250.000
6. Tanah Seluas 7880 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 470.100.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **583.650.000**

1. MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.150.000
3. MOBIL, CHEVROLET MPV Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000



4. MOTOR, HONDA VARIO 150 CC Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000

5. MOBIL, MAZDA CX-3 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 373.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 74.329.428

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 10.027.429.428

III. HUTANG Rp. 64.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 9.963.429.428

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.